

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Dewi Amaliyah¹, Sigit Prihanto Utomo²,

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}

Email: <mailto:amaliyahamaliah@gmail.com>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Subjek pada penelitian ini merupakan Pemerintah Desa Ngingas yang terdiri dari : (1) Bendahara Desa (2) Kepala Desa, (3) Sekretaris Desa, Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa. Pengumpulan informasi dicoba dengan interview, melaksanakan observasi, serta dokumentasi. Teknik data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan jenis permasalahan yang berpedoman Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dana desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dilihat dari masyarakat. Pelaksanaan juga sudah dapat dikatakan akuntabel dengan melihat pengelolaan sudah sesuai dengan prioritasnya. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.

Kata kunci: Pemerintah Desa Ngingas, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to identify how the management of Village Fund Allocation is carried out by the Ngingas Village Government, Waru District, Sidoarjo Regency. The subjects in this study were the Ngingas Village Government which consisted of: (1) Village Treasurer (2) Village Head, (3) Village Secretary, while the object in this study was Village Fund Allocation. Information gathering is tried by interviewing, carrying out observations, and documentation. The data technique used in this research is descriptive qualitative, with the types of problems guided by Permendagri Number 113 of 2014. The results show that for village fund planning, there is an accountable management seen from the community. Implementation can also be said to be accountable by seeing that management is in accordance with its priorities. Whereas in accountability, seen physically, the results have shown an accountable implementation with a complete accountability report.

Keyword: Ngingas Village Government, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran desa ini ialah sesuatu rencana buat pengelolaan keuangan dana desa supaya tersusun secara sistematis serta pas pada target demi berjalanya sesuatu organisasi dalam pemerintahan desa. Sesuai dengan peraturan pemendagri Nomor. 113 tahun 2014 bagaikan pedoman kalau anggaran pemasukan serta belanja desa (APBDES), yang ialah kebutuhan buat pembangunan desa dengan terdapatnya pengelolaan dana desa yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Anggaran pemasukan serta belanja desa merupakan gambaran dalam pertumbuhan serta berjalannya sesuatu pemerintahan yang lagi berjalan.

Dana desa ini bersumber dari APBN yang hendak diberikan secara bertahap serta di bagikan kepada APBD kabupaten/ kota guna mendistribusikan dana tersebut sehingga hingga pada pemerintah desa

guna membiayai tiap pembangunan infrastruktur serta sebagian program desa desa tersebut. Pembagian dana desa ini di hitung bersumber pada 4 aspek ialah, jumlah penduduk dalam sesuatu desa, luas daerah(desa) angka kemiskinan serta kesusahan geografis/ akses mengarah daerah tersebut(desa). Dengan terdapatnya alokasi dana desa ini menjadikan dana tersebut bagaikan sumber pendapatan yang hendak digunakan buat tingkatkan infrastruktur desa sehingga dapat tingkatkan taraf hidup untuk warga desa.

Dengan tujuan buat mendesak penerapan tata kelola keuangan yang efektif akuntabel, transparan. Perihal ini guna buat tingkatkan mutu Laporan Keuangan serta pusat hingga daerah.

Kerangka konseptual



Kerangka Berpikir dipaparkan kalau riset ini hendak menganalisis tentang Alokasi Dana Desa yang dikasih oleh pemerintahan pusat kepada Desa Ngingas Kecamatan Waru, serta pengelolaan dana desa yang berikutnya dikerjakan oleh fitur, periset memakai pedoman yang dikeluarkan oleh Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

RUMUSAN MASALAH

bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngingas dalam tingkatkan kesejahteraan Warga Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

TUJUAN PENELITIAN

1. Buat mengenali bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa buat tingkatkan kesejahteraan warga di desa ngingas kabupaten sidoarjo.
2. Untuk mengetahui apa saja yang dijalankan oleh bagian pemerintahan desa dalam mengelola anggaran desa demi kesejahteraan masyarakat

TELAAH PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Yuri Fansiska (2018), "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)". Ishad Choirul Islam (2018) Melakukan Penelitian ini berjudul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik" yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sri Lestari (2017)

METODE PENELITIAN

Pada riset ini memakai tipe riset deskriptif kualitatif yang bertujuan buat menganalisis Akuntabilitas Alokasi nya Dana Desa dalam kesejahteraan warga yang dilaksanakan di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Tata cara dalam riset ini ialah perihal yang sangat dibutuhkan sebab sesuatu riset sukses bergantung dari tata cara yang digunakan. Dengan memakai tata cara dalam melaksanakan riset diharapkan bisa mendapatkan penjelasan yang lumayan dari periset dalam menyusun riset yang sistematis.

HASIL PENELITIAN

Perencanaan Dana Desa

pengumpulan informasi yang telah dicoba periset menimpa pengelolaan keuangan desa, aspek perencanaan dan berpedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dari hasil observasi tersebut bisa di analisis prosedur penerapan universal dari aspek perencanaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Ngingas.

Bersumber pada dari hasil analisis serta ulasan pada aspek perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, secara universal telah dijalankan dengan baik serta cocok dengan peraturan yang terdapat. Serta Bisa dibuktikan dengan partisipasi warga desa telah baik serta transparansi dalam perencanaan pula teruji. Pemerintah Desa Ngingas telah melaksanakan proses tersebut dengan tepat,

dilaksanakan bagian Sekretaris Desa bagaikan koordinator keuangan desa serta Kepala Desa Ngingas bagaikan penanggungjawabnya, khususnya Dana Desa, oleh sebab itu program perencanaan serta Musrenbang merupakan kumpulan musyawarah yang mangulas ide-ide pendapat perencanaan ataupun program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip- prinsip Perencanaan.

Pelaksanaan Dana Desa

prosedur pelaksana universal dari aspek penerapan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Ngingas. Dimana prosedur yang telah dilaksanakan Seluruh penerimaan serta pengeluaran desa dalam rangka penerapan kewenangan desa dilaksanakan lewat rekening kas ke desa, Pengeluaran desa yang menyebabkan beban anggaran Desa tidak bisa dilaksanakan sebalum.

Dalam pengelolaan sesi penerapan buat realisasi pembangunan dalam bidang pembangunan raga desa, pembinaan, serta pemberdayaan warga desa buat tiap wujud penerimaan dan pengeluaran dana .

dicoba lewat rekening kas desa dan fakta penerimaan serta pengeluaran dana wajib disertakan dengan fakta yang lengkap serta legal yang dimana berikutnya hendak dicoba penatausahaan oleh bendahara desa. Pemerintah desa Ngingas dalam melaksanakan proses pembangunan dilarang buat melaksanakan pungutan kepada warga desa bagaikan bonus dana dalam melaksanakan operasional pembangunan desa.

Perihal itu disebabkan kalau dalam pemberian anggaran buat tiap tahunnya hadapi peningkatan yang signifikan.

Pertanggungjawaban Dana Desa

menimpa pengelolaan keuangan Desa aspek pertanggungjawaban dengan berpedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pelaksana universal dari aspek pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah desa Ngingas.

Wujud dari pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pengelolaan dan penerapan dari Alokasi Dana Desa di Desa Ngingas telah jadi satu pembukuan dalam Laporan APBDesa yang terbuat tiap akhir tahun. Laporan tersebut wajib diinformasikan kepada warga serta lembaga terpaut secara tertulis serta dengan media data yang gampang diakses oleh warga.

Prosedur penataan laporan pertanggungjawaban disusun secara sistematis sehingga bisa dipahami serta dimengerti oleh pihak yang memerlukan. Proses penataan laporan pertanggungjawaban yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Ngingas mempunyai

ketentuan dari Pemerintah Kota dalam melakukannya, ada batasan waktu yang sudah diresmikan dalam pengiriman laporan tersebut.

dari hasil analisis yang sudah periset pada sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa khususnya secara pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan baik serta cocok dengan pedoman pelaporan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2014.

PEMBAHASAN

Bersumber pada dari hasil analisis pengelolaan aspek bidang perencanaan, secara universal telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Ngingas walaupun ada satu prosedur perencanaan yang belum dicoba oleh pihak pemerintah desa. Dalam proses pengelolaan keuangan aspek perencanaan,

pihak pemerintah desa telah melaksanakan proses perencanaan dengan baik serta pas cocok dengan ketentuan yang berlaku.

Dimana proses ini perencanaan diawali dari pembuatan peraturan tentang pemakaian dari APBDesa tahun berjalan serta mengadakan proses musyawarah dalam rencana pembangunan desa dengan mengaitkan organisasi desa, tokoh warga, sampai pihak kecamatan. Dalam proses perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ngingas.

cocok dengan teori yang diungkapkan di atas dengan proses ini buat tingkatkan kinerja operasional pemerintah desa serta memajukan pembangunan serta pemberdayaan pembinaan warga.

Dalam aspek Penerapan dari pemakaian keuangan desa khususnya nampak telah dilaksanakan dengan baik serta cocok dengan tujuan pemberian serta pemakaian Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah. Perihal tersebut nampak dari sisi prinsip akuntabilitas penerapan Dana Desa ditempuh lewat pelaporan ialah laporan bulanan serta laporan tiap- tiap aktivitas memakai aplikasi sistem keuangan desa.

SIMPULAN

Bersumber pada hasil analisis serta ulasan yang sudah dicoba periset, bisa disimpulkan bahwa Aspek Perencanaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Ngingas telah dilaksanakan dengan baik cocok dengan prosedur. Walaupun ada satu prosedur yang tidak dilaksanakan namun perihal tersebut seluruhnya jadi tanggungjawab dari Pemerintah Kota/ Kabupaten Sidoarjo, dalam penerapan dari Alokasi

Dana Desa yang sudah dilaksanakan spesialnya oleh Bendahara Desa Ngingas telah dicoba dengan baik. Bendahara Desa sudah melaksanakan seluruh prosedur terpaat penatausahaan mulai dari penata usahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, Serta penatausahaan pertanggungjawaban. Dan dalam proses penatausahaan yang dikerjakan oleh Bendahara Desa Ngingas telah memakai buku- buku pembantu dalam proses penatausahaannya.

Aspek pertanggungjawaban terpaat pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan Desa Ngingas secara universal telah dilaksanakan dengan baik. Tetapi masih ada satu penerapan yang belum disertakan ialah dalam pelaporan pertanggungjawaban pihak Pemerintah Desa Ngingas tidak melampirkan laporan kekayaan kepunyaan cocok format yang wajib dilampirkan.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. dalam riset ini penulis mempunyai keterbatasan dikala dalam memperoleh data, informasi, yang diakibatkan penulis tidak turut dan dalam zona area desa.
2. Peneliti hanya terbatas pada saat pelaporan kas desa
3. Tidak semua berkas diijinkan untuk di dokumentasi, hanya dokumen tertentu saya yang diperoleh untuk di publikasi dan dijadikan bahan penelitian.
4. Minimnya informasi dalam keterbukaan pemerintah desa Ngingas.

DAFTAR RUJUKAN

Arifiyanto, D. F & Kurohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember

Putra, Chandra Kusuma. "Pengelolaan Alokasi Dana dalam Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singossari Kabupaten Malang"

Kumalasari, D.& Riharjo, I. B. (2016). "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa didalam pengelolaan alokasi dana desa"

Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa pada Kesejahteraan Masyarakat"